

PANDANGAN DAN KONSEP DERADIKALISASI BERAGAMA PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA

Mohammad Akmal Haris
STIT Al-Amin Indramayu
E-mail: akmalmharis@gmail.com

Received	Revised	Accepted
15 Maret 2020	15 April 2020	28 September 2020

THE VIEW AND CONCEPT OF DERADICALIZATION RELIGION NAHDLATUL ULAMA PERSPECTIVE

Abstract

The rise of radicalism in the name of religion as both a school and a movement has become a serious concern of the Indonesian government in stemming it. The Indonesian government through the National Counterterrorism Agency (BNPT) is trying to take strategic steps in countering this radical movement, one of which is by cooperating with the Islamic organization Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama as a moderate social organization, in addition to having a strong and extensive organizational network capital that can reach the grassroots, it is hoped that it will be very strategic in countering the spread of radical and extreme ideals in Indonesia. The concept of deradicalization applied by Nahdlatul Ulama is carried out in a persuasive manner by promoting a humanist approach in building dialogue within the internal Islamic community. For example, through the da'wah movement of NU scholars and kiai, through pesantren networks, through scientific studies such as *bahtsul masail*, NU online preaching media, and by fortifying the Aswaja based NU educational institution (*Ahlussunah wal Jamaah*).

Keywords: deradicalization, religion, and Nahdlatul Ulama.

Abstrak

Maraknya radikalisme yang mengatasnamakan agama baik sebagai paham dan gerakan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam membendunginya. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berusaha melakukan langkah-langkah strategis dalam mengkonter gerakan radikal tersebut, salah satunya dengan menggandeng ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfaham moderat, di samping juga memiliki modal jaringan organisasi yang kuat dan luas yang dapat mencapai akar rumput sehingga diharapkan sangat

strategis dalam menkonter penyebaran paham radikal dan ekstrem di Indonesia. Konsep deradikalisasi yang diterapkan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan cara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun dialog di kalangan internal masyarakat Islam. Misalnya, melalui gerakan dakwah para ulama dan kiai NU, melalui jejaring pesantren, melalui kajian-kajian ilmiah seperti *bahtsul masail*, media dakwah online NU, serta dengan membentengi lembaga pendidikan NU berbasis Aswaja (*Ahlussunah wal Jamaah*).

Kata kunci: deradikalisasi, agama, dan Nahdlatul Ulama

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, selain demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), diskursus yang muncul ke permukaan politik domestik maupun internasional, khususnya yang berkaitan dengan persoalan religio-politik, adalah mengenai “kebangkitan” Islam politik, yang terkadang ditandai dengan merebaknya fenomena “radikalisme” Islam. Dalam sejumlah literatur, istilah radikalisme memiliki pemaknaan yang serupa dengan istilah lain seperti neo-fundamentalis, ekstrem, militan, intoleran, yang semuanya memiliki konotasi negatif. Bahkan sejak 11 September 2001, istilah radikalisme dan fundamentalisme dicampur-adukkan dengan terorisme¹.

Walapun sudah dipahami bersama bahwa agama merupakan sumber etika dalam kehidupan yang memberikan panduan dalam berpikir maupun bertindak agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat². Namun demikian, dalam praktiknya, ekspresi keberagamaan tidak jarang justru membawa penganutnya pada tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan “keselamatan dan kedamaian”. Sikap inilah yang tercermin pada sikap berislam yang radikal, ekstrem dan berlebihan. Radikalisme tidak mutlak pada agama, tetapi agama, bila disalahfahami atau difahami secara sempit, dapat memberikan stimulus dan legitimasi bagi lahirnya sikap radikal dalam berpikir dan bertindak.

Radikalisme agama di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan yang keras dan ekstrem dalam memahami teks ayat suci al-Qur’an secara leterlek. Pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan pendidikan pun ikut andil dalam memengaruhi radikalisme atas nama agama³.

Belakangan ini, radikalisme atas nama agama merebak hampir di semua lapisan masyarakat, mulai kelompok yang terdidik seperti siswa⁴, mahasiswa, guru, dosen, dan kelompok terdidik lainnya, hingga kelompok yang kurang terdidik dari kalangan masyarakat

¹ Mohamad Rapik, “Deradikalisasi Paham Keagamaan Sudut Pandang Islam,” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).

² Ali Miftakhu Rosyad, “The IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION),” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 1–18.

³ Ayub Mursalin and Ibnu Katsir, “Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren Dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren Di Provinsi Jambi,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010): 37096.

⁴ Ibnu Rusydi, “Pengaruh Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Hubungannya Dengan Akhlak Siswa Di Sekolah (Penelitian Di Mts Al-Ghozali Kab. Indramayu),” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1, March (2018): 133–40.

awam. Dalam konteks sejarah bangsa Indonesia, gerakan radikalisme agama bukanlah sebuah gerakan baru. Gerakan radikalisme agama di masa lalu dan masa sekarang memiliki persamaan yakni untuk membebaskan umat dari penjajahan. Perbedaannya adalah pada lawan yang dihadapi. Bruinessen, menyatakan bahwa sejarah Indonesia diwarnai oleh gerakan-gerakan radikal keagamaan. Pada masa lalu gerakan radikal keagamaan berhadapan dengan lawan yaitu penjajah kolonial yang berlainan agama, sedangkan pada masa sekarang lawan yang dihadapi oleh gerakan radikal adalah pihak yang berbeda faham dan dianggap menjajah sekalipun seagama⁵.

Kendati Pemerintah sudah melakukan tindakan konkret dengan melakukan pelarangan bahkan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang terindikasi berfaham radikal, tetapi tetap saja persoalan radikalisme dalam beragama tidak mudah diurai apalagi dituntaskan sampai ke akar-akarnya, karena kelompok tersebut terus bermetamorfosis dan berkembang dengan istilah lain serta terus melakukan pengkaderan secara masif dengan target utamanya terutama kaum muda⁶. Kalangan pemuda sebagai *agent of change* (agen pembaharuan) memiliki kecenderungan lebih kuat dan kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam gerakan sosial radikal dibandingkan dengan orang dewasa yang disebabkan adanya fase transisi dalam pertumbuhan usia yang menyebabkan rawan krisis identitas. Krisis inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya pembukaan kognitif sehingga mereka mampu menerima gagasan baru yang bersifat radikal. Jalur lain yang memungkinkan kaum muda menjadi partisipan dalam gerakan radikal adalah adanya "kegoncangan moral".⁷

Bukti ini diperkuat atas temuan data hasil survei yang dipublikasikan Wahid Foundation bekerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia), tentang intoleransi dan radikalisme yang dilakukan pada 34 Provinsi menunjukkan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme di Indonesia sangat terbuka. Dari 1520 responden (beragama Islam berumur 17 tahun ke atas), sebanyak 59,9% dari mereka menyatakan memiliki kelompok yang dibenci. Terdapat 7,7% responden yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4% justru pernah melakukan tindakan radikal. Meskipun hanya sebesar 7,7% yang menyatakan bersedia melakukan aksi, namun persentase tersebut tetap mengkhawatirkan. Sebab, 7,7% jika proyeksinya dari 150 juta umat Islam Indonesia berarti terdapat sekitar 11 juta orang yang bersedia bertindak radikal.⁸

Temuan survei tersebut menunjukkan bahwa kaum muda merupakan sasaran utama kaderisasi kelompok radikal, sehingga tidak heran jika para pemuda ini kerap menjadi pelaku lapangan dalam berbagai aksi radikal. Keterlibatan kalangan pemuda tersebut menunjukkan peran mereka sebagai elemen penting dalam gerakan radikal di Indonesia.

⁵ Martin Van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 117–54.

⁶ M Pd I Kambali, "RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH AL-ZARNUJI DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MODEREN," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 17–30.

⁷ Muhammad Najib Azca, "Yang Muda yang Radikal; Refleksi Sosiologis terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity* 8, no. 1 (2013): 14–44.

⁸ Musa Rumaruru Hasse J., "Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik," *Jurnal Al-Ulum* 16, no. 2 (2016): 368–386.

Cukup beralasan, para pemuda menjadi *target man* dalam proses kaderisasi faham radikal mengingat para pemuda menghadapi sejumlah persoalan secara sosial, seperti pengangguran, marjinalitas, hingga sentimen kehilangan pegangan, dalam hal ini figur panutan yang kemudian membuat mereka menjadi sumber penting rekrutmen radikalisme.⁹

Bertolak dari paparan fenomena di atas, sebagai bagian dari upaya dalam mengkonter dan memutus mata rantai radikalisme yang mengatasnamakan agama diperlukan keseriusan dan tindakan nyata bersama dari berbagai *leading sector*. Sebab, tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak berwenang saja dalam hal ini Pemerintah belumlah cukup mengurai dan memutus mata rantai radikalisme sampai ke akar-akarnya. Dibutuhkan perhatian dan sinergitas dari berbagai pihak dalam hal penyamaan persepsi, minimal pada tataran konsep deradikalisasi beragama yang tepat sebagai solusi alternatif.

Secara umum, strategi Pemerintah Indonesia dalam melawan radikalisme dan terorisme adalah dengan menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*). Pendekatan keras adalah dengan melakukan tindakan keras terhadap para pelaku teror dengan melibatkan militer dan intelijen. Sementara tindakan lunak yaitu dengan melibatkan kerja sama dengan seluruh institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa termasuk ormas Islam. Dan salah satu ormas Islam Indonesia yang memiliki posisi tegas terhadap maraknya fenomena radikalisme adalah Nahdhatul Ulama (NU). Ormas Islam ini sangat banyak mengutarakan kecaman terhadap faham dan aksi radikalisme yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap pandangan dan konsep yang diusung NU dalam menyikapi persoalan radikalisme agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

1). Data dan Sumber Data

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹¹

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan, studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹²

⁹ Asef Bayat, "Muslim Youth and the Claim of Youthfulness," dalam Tien Rohmatin, "Nilai-nilai Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2016): 133–152.

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹² Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.

Jadi semua dokumen bisa digunakan asalkan ada keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2). Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi pemikiran atau hasil temuan yang terdapat dalam buku, makalah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

3). Analisis Data

Metode deskriptif merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka representasi objektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah yang diteliti.¹³ Atau dapat juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematisir sedemikian rupa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memahami Term Radikalisme

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai radikalisme, ada baiknya kita mulai dari aspek kebahasaan, radikalisme berasal kata dasar “*radix*” (akar; Latin). Dalam bahasa Inggris kata “*radical*” dapat bermakna ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan “*radicalism*” artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrem.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai “paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.”¹⁵ Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai “gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkolan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.”¹⁶ Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrem, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.¹⁷

Radikalisme beragama dalam tulisan ini penulis definisikan sebagai pengimplementasian paham dan nilai ajaran agama (Islam) dengan cara radikal (keras), fanatik, ekstrem atau mendasar¹⁸. Namun perlu dicatat juga, bahwa radikalisme paham keagamaan tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan yang bersifat anarkis. Dalam realita memang dapat ditemui bahwa sebagian kelompok gerakan radikal keagamaan hanya terbatas pada pemikiran dan ideologi, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan paham ajarannya, tetapi sebagian kelompok radikal yang lain menghalalkan

¹³ Hasan.

¹⁴ Nuhrison M. Nuh, “Faktor-faktor Penyebab Munculnya Paham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia,” *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, no. 31 (2009): 36–47.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

¹⁷ Mohammad Kosim, “Pesantren dan Wacana Radikalisme,” *Jurnal Karsa* 9, no. 1 (2006): 842–853.

¹⁸ Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, “PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA,” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75–99.

cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan faham keagamaannya. Karena itu, gerakan radikalisme keagamaan tidak selalu ditandai dengan anarkisme atau terorisme.

Radikalisme Beragama; Ciri dan Faktor Penyebabnya

Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme beragama dalam Islam. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya dari Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*. *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada al-Qur'an dan hadits. *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk Pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologi bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk Pemerintah.¹⁹

Munculnya semangat radikalisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu penyebab utama dari munculnya radikalisme dalam beragama adalah pemahaman akan agama itu sendiri. Lebih jauh, Azyumardi Azra seperti dikutip Abdul Munip²⁰ mengatakan bahwa radikalisme di kalangan umat Islam banyak bersumber dari:

- a). Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong, parsial terhadap ayat-ayat al-Qur'an.
- b). Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu.
- c). Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.
- d). Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi dengan berbagai faktor yang sangat kompleks.
- e). Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad.

Kelompok radikal ini kemudian membawa pemahamannya sendiri ke tengah masyarakat dan berusaha mengartikulasikan dan mengimplementasikannya dalam wujud-wujud perubahan yang radikal terhadap tatanan sosial-keagamaan, seperti budaya Islamisasi, maupun tatanan politik dan hukum seperti proyeksi negara Islam, syariat Islam, ekonomi Islam dan sebagainya yang berbau Islam. Sebagian dari sikap ini dapat ditoleransi dan dibenarkan dalam wadah demokrasi, namun semangat berlebihan ini lebih banyak yang bersifat destruktif dan tidak dapat dibenarkan.

¹⁹ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010).

²⁰ Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159–181.

Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan cita-cita ideal tersebut, penyebaran faham radikal ini memanfaatkan sejumlah media yang ada, baik melalui gerakan politik, maupun gerakan *civil society*. Namun, apapun bentuk gerakannya, salah satu ciri dan sekaligus menjadi basis utama gerakan ini adalah pendidikan melalui jalur pengkaderan yang terukur, penguasaan masjid, penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik.²¹ Tentu tidak semua yang melakukan pengkaderan, berbasis di masjid, dan menggunakan media adalah gerakan radikalisme.

Kesalahan lain dari kelompok radikal adalah karena mereka tidak mampu mendialogkan antara nilai moral yang terdapat dalam agama maupun fakta di lapangan. Menyangkut hal ini, tidak jarang terdapat pertentangan antara yang ideal dengan yang nyata, antara cita dan fakta, atau antara teks dan konteks lantaran pemahaman yang teramat kaku dan linier. Akibatnya, pandangan semacam ini seringkali terpatahkan oleh realitas sosial yang senantiasa berubah yang memang sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak dapat diubah.

Deradikalisasi Faham Keagamaan

Deradikalisasi atau *de-radicalization* adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan proses perubahan atau merubah pandangan orang atau masyarakat terhadap dunia, dari yang cenderung “ekstrem” menuju masyarakat yang normal. Konsep deradikalisasi menjadi sangat penting setelah melihat kasus kekerasan bahkan sampai aksi tindak terorisme yang terjadi berulang kali dengan dalih jihad atas nama agama meskipun para pelakunya telah ditindak dengan sangat tegas dan keras. Menghukum dan menindak secara tegas pelaku terorisme ataupun radikalisme tidak serta merta dapat menghentikannya.²²

Sebagai sebuah konsep tindakan, pendekatan, dan strategi aksi deradikalisasi harus dikaitkan dengan akar katanya itu sendiri, radikal atau radikalisme. Radikal artinya dasar atau akar. Sikap dan pandangan radikal bila hanya berada pada ranah keilmuan, hal itu justru dinilai positif, karena merupakan ciri berpikir filsafat. Dengan cara berpikir filsafat itulah akan mampu menyelam sampai lapis-lapis makna, bukan hanya lapis permukaan. Karena yang menjadi persoalan adalah bila sikap radikal tersebut pada ranah gerakan sosial keagamaan, maka sikap radikal itu disetarakan dengan gerakan fundamentalisme, militanisme dan ekstremisme, yaitu tindakan yang dipandang melampaui batas kenormalan dalam beragama, sehingga dampaknya justru merugikan tatanan kehidupan masyarakat yang plural.²³

Deradikalisasi agama dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan melalui pendidikan sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat. Pemahaman kontekstual dan

²¹ Munip.

²² Hasyim Muhammad, Khoirul Anwar dan Misbah Zulfa E., “Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal,” *Jurnal Walisongo* 23, no. 1 (2015): 197–222.

²³ Mudjahirin Thohir, *Multikulturalisme, Agama, Budaya dan Sastra* (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2013).

pembumian nilai humanitas agama akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme, dan terorisme.²⁴

Makna deradikalisasi belakangan ini mengalami perluasan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Arif, bahwa yang dimaksud dengan perluasan makna ialah deradikalisasi tidak melulu dipahami sebagai proses moderasi terhadap keyakinan agama dan perilaku seseorang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi radikal, tetapi sebagai: “Deteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menysasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran”. Pemaknaan seperti ini mulai berkembang di Indonesia sehingga deradikalisasi tidak hanya terbatas dilakukan pada bekas kombatan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai ruang publik serta melalui berbagai media.²⁵

Deradikalisasi faham keagamaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membentuk forum-forum kerukunan umat beragama, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan radikalisme dan terorisme secara hierarkis dari pusat sampai ke daerah, melalui pendidikan perdamaian (*peace education*) di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal, dan informal, serta Pemerintah juga harus mendorong semua pihak termasuk ormas-ormas di masyarakat untuk terlibat bersama menangkal radikalisme.

Dengan munculnya program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah mengajak masyarakat yang terpapar faham radikal terutama para tahanan teroris, keluarga serta jaringannya, agar terlepas dan kembali kepada esensi dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan aturan agama dan negara. Program deradikalisasi diharapkan bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya para penegak hukum maupun lembaga pemerintahan lainnya tetapi juga masyarakat dan elemen yang ada di dalamnya. Maka diharapkan dengan adanya program deradikalisasi yang baik dan benar, tentunya dengan pemetaan masalah baik dari hulu hingga hilir sehingga bisa tepat sasaran.²⁶

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi jamiah lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan faham Islam *ahli sunnah wal jama'ah* aliran pemikiran Islam di bidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrem kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Responsif, akurat, dan objektif atas kompleksitas problema empirik masyarakat bangsa tidak cukup hanya dengan

²⁴ Imam Mustofa, “Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya,” *Jurnal Akademika* 16, no. 2 (2011): 1–18.

²⁵ Mustofa.

²⁶ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan* (Jakarta: Daulat Press, 2017).

mengandalkan peran Kiai (ulama) semata, sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga profesional muda yang terampil, visibel dan kapabel dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis. Di sinilah pendirian sebuah organisasi yang independen dan otonom Nahdlatul Ulama (NU) mengemukakan pikiran urgensinya.²⁷

Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia sembilan puluh empat tahun, dalam diri Nahdlatul Ulama terdapat kelompok yang beragam sehingga dari organisasi Nahdlatul Ulama mempunyai wacana beragam pula, dampak dari semua itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut: (1). Terdapat indikasi yang kuat dan tarik-menarik antara dorongan eksternal negara yang ingin menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari proses hegemoni negara, (2). Semangat internal dari generasi muda Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan *khittah* 1926 menjadi gerakan masyarakat sipil, dan (3). Menghendaki Nahdlatul Ulama sebagai gerakan masyarakat sipil yang berpijak pada paham liberalisme lebih bertujuan untuk menuntut kebebasan masyarakat untuk “debirokratisasi” dari negara termasuk “deregulasi ekonomi”. Selain itu, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang telah berusia 94 tahun, namun sebetulnya usia Nahdlatul Ulama dari tradisi telah ada sebelum itu. Dengan kata lain, banyak suka dan duka yang telah dilalui sehingga tidak sedikit juga pelajaran yang bisa dipetik.

Dari perjalanan panjang tersebut, minimal Nahdlatul Ulama telah mengalami tiga fase yakni fase Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan menitikberatkan pada aspek sosial dan keagamaan. Kemudian fase Nahdlatul Ulama politik, karena Nahdlatul Ulama menempatkan dirinya sebagai partai politik atau bergabung ke dalam partai politik seperti Partai Nahdlatul Ulama dan Masumi, dan terakhir adalah fase kultural. Dengan usianya yang lebih tua dibandingkan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan sudah banyak makan asam garam dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Namun, sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama tidak mungkin terpaku statis pada satu sistem manajemen. Konsep-konsep perorganisasian Nahdlatul Ulama yang diterapkan pada tahun-tahun awal berdirinya ternyata harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan pada dekade sesudahnya. Konsep itu pun harus disesuaikan ketika pemerintah pendudukan militer Jepang berkuasa dengan kekuasaan *fascist*-nya membekukan seluruh orpol dan ormas dalam bentuk apapun di seluruh Indonesia. Dan konsep manajemen organisasi Nahdlatul Ulama berubah lagi ketika menjadi partai politik. Perubahan-perubahan organisasi Nahdlatul Ulama itu membawa konsekuensi perubahan visi dan persepsi perjuangan tentang misi organisasi.

Di sinilah, atau di sektor perubahan visi dan persepsi perjuangan tentang misi jamiyah inilah yang perlu terus-menerus diwaspadai, karena perubahan-perubahan itu terjadi pada intensitas yang tinggi, sejalan dengan perubahan-perubahan dinamika masyarakat bangsa dan negara. Karena telah menjadi perubahan visi dan persepsi perjuangan tentang misi jamiyah itulah, maka ada istilah ‘kembali ke *khittah* 1926’ yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan itu dirasakan sudah terlampaui jauh menyimpang dari visi perjuangan Nahdlatul Ulama.²⁸ Salah satu upaya dalam mewujudkan ide kembali ke *khittah* adalah

²⁷ Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU* (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2004).

²⁸ Choiril Anam, *Ansor dalam Dinamika* (Jakarta: Lajnah Ta’lif wan-Nasyr, 1995).

upaya pemberdayaan kaum *nahdliyin* dan masyarakat umum dengan memprioritaskan program-program sosial, ekonomi, pendidikan sebagai bidang garapan. Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama tidak meninggalkan kiprah politik sama sekali. Yang terjadi justru perubahan paradigma, melalui reinterpretasi dan reorientasi terhadap wacana praktis politik sehingga menjadi lebih luwes dalam mensiasati berbagai perubahan dan perkembangan yang akan terjadi. Selain pada tataran pemikiran, Nahdlatul Ulama juga berusaha menyumbangkan tenaga dalam proses pemberdayaan masyarakat terutama yang berada di bawah dan tertindas (*mustadh'afin*) lewat kerja-kerja rintisan dan proyek-proyek pengembangan swadaya masyarakat, baik dilakukan sendiri maupun berkerja sama dengan pihak luar walaupun hasil yang dicapai belum maksimal. Nilai-nilai ke-Islaman yang dijadikan prinsip-prinsip dalam organisasi Nahdlatul Ulama seperti: *tasamuh*, *tawazun*, dan keberpihakan terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*), kemandirian para ulama berdampingan dengan penguasa, dan kosmopolitanisme Islam, yang merupakan potensi kultural umat Islam secara umum di Indonesia tidak jauh berbeda dengan tradisi *civil society* di Eropa. Menurut M. Saekhan Muckith, bahwa Nahdlatul Ulama di Indonesia pantas disebut organisasi massa (ormas) terbesar dengan jumlah pengikut hampir 42 juta jiwa dan tersebar hampir secara merata di seluruh Indonesia.²⁹

Strategi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mengkonter Radikalisme

Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan sudah saatnya negara secara lebih serius melibatkan ormas-ormas Islam guna meluruskan faham-faham radikal tersebut. Radikalisme dan terorisme, tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintah dan aparat keamanan saja. Melibatkan ormas-ormas besar pendiri bangsa merupakan langkah yang bijaksana untuk memoderasi pandangan-pandangan yang terlanjur ekstrem dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme. Adapun bentuk dan substansi moderasi tersebut diserahkan kepada masing-masing ormas. Di samping itu Pemerintah mengajak ormas-ormas tersebut untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi.

Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal mengatakan dalam hal keindonesiaan, sebenarnya Indonesia memiliki modal berharga untuk mencapai tatanan masyarakat yang maju, menurut Mohammed Arkoun menilai masyarakat Indonesia memiliki watak yang toleran dan terbuka.³⁰ Pandangan NU menolak dan menentang terhadap wacana aksi gerakan radikal, dalam hal ini Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menyebut pelaku radikalisme atas nama Islam merupakan kejahatan, perilaku demikian menurutnya tidak lepas dari ketidakpahaman terhadap makna Islam substansial. Fenomena gerakan radikalisme atas nama agama menurut kiai Said merupakan bentuk kezaliman, aksi radikalisme lebih mengkhawatirkan dari kejahatan lainnya. Radikalisme dilatarbelakangi ketidakpahaman agama secara utuh, dengan menggunakan simbol

²⁹ Koran Duta Masyarakat, "Mempertayakan Profesionalisme NU," (11 Oktober 2002).

³⁰ A. Helmy Faishal Zaini dalam Artikel Harian Kompas, "Agama dan Kekerasan; Mengurai Fikih Toleransi," (Jum'at 4 Desember 2015).

agama dalam aksi radikal. Dalam banyak kasus, aksi radikal dilakukan adanya donatur berjejaring internasional dengan memakai simbol agama.³¹

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam merespons gerakan radikalisme ada dua upaya, yakni dengan pendekatan lunak (*soft power*) dan pendekatan keras (*hard power*), dalam pendekatan *soft power* NU banyak melakukan dakwah kultural (pribumisasi Islam), kampanye di media sosial dengan menggunakan jaringan *Cyber Force* (NU *Cyber Troop*), melakukan diplomasi ke berbagai aktor baik itu dalam cakupan nasional dan internasional.³² Sedangkan pendekatan *hard power*, Nahdlatul Ulama melalui badan otonomnya Gerakan Pemuda Ansor atau sering dikenal dengan GP Ansor telah berkomitmen dalam mengawal eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yaitu melawan setiap kelompok radikal dan anti-Pancasila yang berpotensi mengganggu kebinekaan bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Nahdlatul Ulama telah melakukan langkah-langkah nyata. Dalam Muktamarnya ke-32 di Makassar pada tahun 2010, NU mengusung tema "*Khidmah Nahdliyah untuk Indonesia Bermartabat*". Tema tersebut disusun berdasarkan keprihatinan merebaknya faham-faham radikal, baik radikal dalam beragama maupun ultra liberal, sehingga dikhawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Program aksi tersebut meliputi tiga hal, yakni dakwah, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Tersirat di dalamnya kehendak untuk membangun kemandirian umat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, memperkuat ajaran *Ahlussunah wal Jamaah* (Aswaja/Islam Nusantara) yang moderat toleran dan menjauhi kekerasan, berkeadilan, dan berkeadaban. Kemudian pada Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur Tanggal 1-5 Agustus 2015, sikap NU dalam merespons perkembangan global dan nasional semakin dipertegas dengan mengambil tema "*Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Indonesia dan Peradaban Dunia*." Secara garis besar program aksi NU dalam mengkonter radikalisme agama di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pertama, di bidang dakwah; melalui langkah-langkah afirmasi nilai-nilai *Ahlussunah wal Jamaah An-Nahdliyah* sekaligus untuk menegasi faham-faham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif. Inti dari dakwah tersebut menegaskan pentingnya Islam Nusantara yang dikembangkan oleh para penyebar Islam sejak awal dakwah Islam di Nusantara yang mampu mewujudkan budaya dan peradaban yang beradab, toleransi, harmoni dan cinta damai. Termasuk dalam kegiatan ini adalah berperan serta dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama dalam level global. Sebagai contoh, NU menyelenggarakan dialog internasional melalui pengiriman delegasi ke Afghanistan dan juga mengundang ulama Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan nilai-nilai *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), *'adalah* (keadilan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang meliputi *ukhuwah Islamiyah* (sesama Islam), *ukhuwah wathoniyah* (sesama warga negara), *ukhuwah basyariah* (sesama umat

³¹<https://www.nu.or.id/post/read/66141/kiai-said-islam-nusantara-sebagai-benteng-dari-timur>, diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 20.26 WIB.

³² <https://news.okezone.com/read/2016/09/03/519/1480165/usai-mou-dengan-polri-tim-cyber-force-nu-semakin-kuat>, diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 19.41 WIB.

manusia). Dialog dan saling kunjung itu membuahkan hasil dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan pada sekitar Agustus 2014 di Kabul.

Kedua, bidang sosial; meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaharuan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa dan mandiri. Studi tentang Islam Nusantara mulai dikembangkan agar bisa menjadi alternatif model Islam dunia untuk mengatasi keterpurukan umat Islam. Kegiatan sosial ini penting untuk mewujudkan empati kepada mereka yang termarginalkan secara sosial.

Ketiga, bidang pemberdayaan ekonomi umat; kegiatan ini diarahkan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan di kalangan *nahdliyin* dan pengembangan ekonomi syariah dengan tujuan jangka menengah dan panjang guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini sekaligus untuk mempraktikkan semangat pluralitas di bidang ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama.

Ketiga program aksi tersebut dilaksanakan pada level struktur mulai dari pengurus besar, wilayah, cabang, lembaga dan badan-badan otonom. Di samping itu, program-program tersebut dilaksanakan pada level non-struktural (kultur) seperti lembaga-lembaga pendidikan milik warga NU, pesantren, masjid, dan surau-surau. Sebagai contoh, Ansor dan Banser menjalankan program moderasi melalui pembentukan Densus 99 dengan kegiatan spiritual untuk mendukung kebijakan pemberantasan radikalisme dan terorisme. Muslimat dan Fatayat NU membentuk ribuan pendidikan anak usia dini yang bertujuan menanamkan sikap beragama yang moderat dan toleran.³³

Simpulan

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran radikalisme dan ekstremisme mulai masuk ke sejumlah kelompok Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang ditunjuk sebagai mitra kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam hal pencegahan paham radikalisme memiliki pengaruh yang sangat vital dalam membina masyarakat dan menjaga agar pemikiran radikalisme dan ekstremisme tidak berkembang lebih jauh lagi di kelompok masyarakat Muslim Indonesia.

Pandangan Nahdlatul Ulama menolak dan menentang keras terhadap setiap aksi gerakan radikal terutama dengan dalih jihad atas nama agama. Konsep deradikalisasi yang diterapkan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan cara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun dialog di kalangan internal masyarakat Islam. Misalnya, melalui gerakan dakwah para ulama dan kiai NU, melalui jejaring pesantren, melalui kajian-kajian ilmiah seperti *bahtsul masail*, media dakwah *online* NU, serta dengan membentengi lembaga pendidikan NU berbasis *Aswaja (Ahlussunah wal Jamaah)*.

³³ As'ad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU), <https://www.nu.or.id/post/read/58396/peran-nu-dalam-menangkal-radikalisme>, diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 21.02 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said (Wakil Ketua Umum PBNU). <https://www.nu.or.id/post/read/58396/peran-nu-dalam-menangkal-radikalisme>. Diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 21.02 WIB.
- Anam, Choiril. *Ansor dalam Dinamika*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan-Nasyr, 1995.
- Azca, Muhammad Najib. "Yang Muda yang Radikal; Refleksi Sosiologis terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity* 8, no. 1 (2013): 14-44.
- Bayat, Asef "Muslim Youth and the Claim of Youthfulness," dalam Tien Rohmatin. "Nilai-nilai Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2016): 133-152.
- Bruinessen, Martin Van. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 117-54.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasse J., Musa Rumbaru. "Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik." *Jurnal Al-Ulum* 16, no. 2 (2016): 368-386.
- <https://news.okezone.com/read/2016/09/03/519/1480165/usai-mou-dengan-polri-tim-cyber-force-nu-semakin-kuat>. Diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 19.41 WIB.
- <https://www.nu.or.id/post/read/66141/kiai-said-islam-nusantara-sebagai-benteng-dari-timur>. Diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 20.26 WIB.
- Idris, Irfan. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Kambali, M Pd I. "RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH AL-ZARNUJI DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MODEREN." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 17-30.
- Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Koran Duta Masyarakat. "Mempertanyakan Profesionalisme NU." 11 Oktober 2002.
- Kosim, Mohammad. "Pesantren dan Wacana Radikalisme." *Jurnal Karsa* 9, no. 1 (2006): 842-853.
- M. Nuh, Nuhrison. "Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia." *Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, no. 31 (2009): 36-47.
- Muhammad, Hasyim, Khoirul Anwar and Misbah Zulfa E., "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal." *Jurnal Walisongo* 23, no. 1 (2015): 197-222.
- Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159-181.
- Mursalim, Ayub, and Ibnu Katsir. "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren Dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren Di Provinsi Jambi." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010): 37096.
- Mustofa, Imam. "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya." *Jurnal Akademika* 16, no. 2 (2011): 1-18.

- Rapik, Mohamad. "Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).
- Rosyad, Ali Miftakhu. "The IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 1-18.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. "PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75-99.
- Rusydi, Ibnu. "Pengaruh Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Hubungannya Dengan Akhlak Siswa Di Sekolah (Penelitian Di Mts Al-Ghozali Kab. Indramayu)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1, March (2018): 133-40.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Shadiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Thohir, Mudjahirin. *MultiKulturalisme, Agama, Budaya dan Sastra*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2013.
- Zaini, Helmy Faishal A. Dalam Artikel Harian Kompas. "Agama dan Kekerasan; Mengurai Fikih Toleransi." *Jum'at* 4 Desember 2015.